

LAMPIRAN II. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA REVIU/EVALUASI PENGUKURAN KINERJA MANDIRI (SELF ASSESSMENT) TERHADAP LPPD TAHUN 2016

KOTA : PRABUMULIH
NAMA SKPD : KECAMATAN PRABUMULIH BARAT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : WAJIB

No	Aspek	Fokus	No	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	Keterangan	Dokumen Pendukung / Kertas Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional ¹ (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak o program	o %	Lihat Program Nasional RKP 2016 untuk masing-masing urusan, (terlampir) .	FC halaman muka (cover) dan halaman dari DPA SKPD yang menunjukkan program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD DPA FORMULIR 2.2 sumber data: seluruh SKPD
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 10 yang terdiri dari: 1. SOP Pelayanan Pencatatan Sipil & Kependudukan 2. SOP Pelayanan Penerbitan HO 3. SOP Pelayanan IMB 4. SOP Pelayanan Penebitan Surat Pernyataan Miskin 5. SOP Pelayanan SKCK 6. SOP Legalisasi Surat 7. SOP Pelayanan Penyusunan RKA 8. SOP Pelayanan PPAS SKPD 9. SOP Penerbitan KTP SIAK 10. SOP Rekomendasi SITU	Ada	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis	FC halaman muka (cover), halaman yang menunjukkan tahapan-tahapan Prosedur, dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya SOP tsb sumber data: seluruh SKPD
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak o - PERDA yang seharusnya, sebanyak o	o % (tidak ada)	1. SPM Kesehatan 2. SPM Sosial 3. SPM Pendidikan 4. SPM Lingkungan Hidup 5. SPM BKKBN 6. SPM Pemberdayaan Perempuan.	Photocopy halaman muka (cover), halaman kedua dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya perda pelaksanaan dari permen tsb. sumber data: seluruh SKPD Daftar rincian yang menunjukkan Permen yang diterbitkan

¹ Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait.

No	Aspek	Fokus	No	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	Keterangan	Dokumen Pendukung / Kertas Kerja
								7. DLL	Kementerian teknis yang mengatur urusan yang ditangani.
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 8 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 8	100 %		FC Daftar susunan Struktur organisasi dari SKPD Daftar rincian jabatan eselonering yang terisi. Daftar rincian jabatan eselonering yang harus ada. sumber data: seluruh SKPD
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,	tidak ada	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.	FC daftar rincian yang menunjukkan jabatan fungsional yang ada di SKPD pada bidang yang menangani urusan terkait. sumber data: seluruh SKPD
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kota	- PNS SKPD , sebanyak 13 personil - Total PNS Kota, sebanyak 4381 personil	0.0029 %	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.	FC daftar rincian yang menunjukkan jumlah PNS SKPD pada bidang terkait. sumber data: seluruh SKPD Surat keterangan jumlah PNS Kota Prabumulih yg ditandatangani oleh pejabat berwenang. sumber data: BKD
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 8 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 8 org.	1 %	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.	Daftar rincian jumlah pejabat yang sudah ikut diklatpim Daftar jumlah pejabat SKPD sumber data: seluruh SKPD
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 8 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 8 jabatan.	1 %	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016.	Daftar rincian yang menunjukkan jumlah pejabat yang ada yang telah memenuhi persyaratan diklatpim. Daftar rincian yang menunjukkan jumlah pejabat SKPD yang ada pada urusan terkait. sumber data: seluruh SKPD
5	PERENCANAAN	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan	9	Keberadaan dokumen perencanaan	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan	Apabila Ada.	3 jenis		FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman

No	Aspek	Fokus	No	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	Keterangan	Dokumen Pendukung / Kertas Kerja
	PEMBANGUNAN DAERAH	yang dimiliki oleh SKPD		pembangunan di SKPD RENSTRA SKPD RENJA SKPD RKA-SKPD	SKPD berikut jumlahnya	dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	dokumen		yang menunjukkan ditandatanganinya: Renstra, Renja dan RKA tsb. sumber data: seluruh SKPD
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 6 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 65 program	100 %	Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.	FC halaman muka (cover), halaman yang menunjukkan program dari SKPD pada urusan terkait. sumber data: seluruh SKPD
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 6 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 6 program.	100 %	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.	FC halaman muka, dan halaman yang menunjukkan program dari SKPD pada urusan terkait yang ada renja yang diakomodir dalam RKA. sumber data: seluruh SKPD.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang tidak diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang tidak diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 6 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 6 program.	100 %	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016.	FC halaman muka, dan halaman yang menunjukkan program dari SKPD pada urusan terkait yang ada pada RKA dan diakomodir dalam DPA sumber data: seluruh SKPD.
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 2.915.763.300 - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 2.869.074.825	1.016 %	Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.	FC Laporan Keuangan SKPD sumber data: seluruh SKPD.
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 80.000.000. - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 79.900.000	1.0012 %	Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 80.000.000 Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 79.900.000	FC Laporan Keuangan SKPD sumber data: seluruh SKPD.
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 224.828.073	0 %	Anggaran - belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0 - belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 224.828.073	FC Laporan Keuangan SKPD sumber data: seluruh SKPD.

No	Aspek	Fokus	No	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	Keterangan	Dokumen Pendukung / Kertas Kerja
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 79.900.000	0 %	Anggaran - belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0 - belanja SKPD, sebesar Rp. 79.900.000	FC Laporan Keuangan SKPD sumber data: seluruh SKPD.
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. LRA 2. CALK 3. Neraca	Ada sebanyak 3 jenis :	Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, CaLK)	FC Laporan Keuangan SKPD sumber data: seluruh SKPD.
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada, Sebutkan jenis dokumennya. 1. Buku Inventaris 2. KIR 3. KIB	Ada	Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.	FC berita acara pelaksanaan inventarisasi. sumber data: seluruh SKPD.
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak 0 asset, senilai Rp 0 - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak 11 asset, senilai Rp. 136.042.261,91	0 %		Daftar rincian yang menunjukkan jumlah aset yang tidak digunakan. Daftar rincian yang menunjukkan total aset yang dikuasai SKPD. sumber data: seluruh SKPD.
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : Papan Pengumuman Pos Pengaduan Leaflet Mobil keliling Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Papan Pengumuman	Ada	Papan Pengumuman	Foto Bukti Fisik : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media sumber data: seluruh SKPD.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang Pelayanan	Ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan terhadap pelayanan publik	FC cover laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada urusan terkait